

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah diatur dengan undang-undang tidak resmi no. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti UU No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan sebagai Penjelasan Pedoman Pembukuan Pemerintah (PSAP), yang disertai dengan Prolog Prinsip-Prinsip Pembukuan Pemerintah dan siap menyinggung Struktur Terapan Pembukuan Otoritas Publik.

SAP seharusnya dapat digunakan sebagai sumber perspektif dalam merencanakan laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah sekitarnya. Total undang-undang tidak resmi tentang Pedoman Pembukuan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010
2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2016
3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2019
4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2020
5. Government Accounting Standards Republic of Indonesia of Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki salah satu standar pembukuan yang diterapkan untuk menyiapkan dan menyajikan laporan anggaran pemerintah. SAP dapat dimanfaatkan sebagai sumber perspektif dalam perencanaan laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

### **2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut Mahsun, Firma dan Heribetus (2011 :81), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah salah satu daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja peraturan daerah untuk masa satu tahun. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan pedoman wilayah untuk jangka waktu satu tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam Pedoman Pendeta Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Perencanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1 Yang dimaksud dengan rencana Pendapatan dan Belanja Konsumsi Daerah adalah pengaturan keuangan tahunan pemerintah provinsi yang dibicarakan dan didukung bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditentukan oleh Pedoman Lokal.

### **2.1.3 Tujuan dan Siklus APBD**

APBD sendiri siap menjadi ajudan bagi pemerintah terdekat untuk mengatur pendapatan dan konsumsi. Motivasi di balik APBD adalah untuk membantu pemerintah lingkungan dalam mencapai tujuan moneter yang menentukan arah, sasaran dan kebutuhan untuk pembangunan keuangan, untuk bekerja pada pedoman atau koordinasi setiap segmen dalam iklim pemerintah terdekat, untuk membuat efektivitas dalam pengaturan tenaga kerja. dan produk, dan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah terdekat.

Siklus adalah salah satu proses yang terus menerus, berputar, dan berkesinambungan.dalam arti luas anggaran daerah berbicara mengenai suatu

siklus mulai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.(Pilat & Morasa, 2017)

Siklus anggaran mempunyai 5 tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan Anggaran, Pada tahap persiapan dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia dengan memperhatikan Uncertainty (tingkat ketidakpastian). Dalam perencanaan APBD menggunakan pendekatan.
2. Bottom Up, pemerintah daerah perlu membuat catatan penataan wilayah. Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum Anggaran.
3. Tahap Ratifikasi, Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat, pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya punya managerial skill tapi juga political skill yang memadai untuk memberikan jawaban dan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif.
4. Tahap Eksekusi Pengeluaran Kerangka kerja akuntansi dan kerangka pengendalian dewan merupakan hal mendasar dalam pelaksanaan pengeluaran.
5. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran, Tahap ini Dilihat dari sisi tanggung jawab, jika tahap pelaksanaan belanja telah didukung oleh sistem pembukuan yang baik dan sistem pengendalian dewan, maka diyakini pada tahap ini tidak akan banyak masalah.

#### 2.1.4 Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran menyatakan pelaksanaan moneter pemerintah pusat/provinsi yang sesuai dengan APBN/APBD dengan memperkenalkan garis besar sumber, penggunaan, dan penggunaan aset keuangan yang diawasi oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pengumuman.

Mengingat undang-undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang pencatatan/proklamasi posisi moneter, artikulasi pembayaran dan laporan perubahan modal suatu perkumpulan atau organisasi yang terjadi pada waktu tertentu. Ringkasan fiskal dapat diminta oleh pendukung keuangan, pekerja, spesialis pinjaman, penyedia, pemberi pinjaman, organisasi yang berbeda, klien, pemerintah dan masyarakat umum sebagai bahan data untuk menentukan pilihan pada laporan anggaran untuk memenuhi keuntungan masing-masing. Laporan anggaran dibuat oleh asosiasi atau organisasi menjelang akhir periode atau menjelang akhir tahun anggaran. Laporan moneter dapat dibuat bulan ke bulan, triwulanan, semesteran setiap tahun dan setiap tahun. Padahal, untuk melayani pihak luar, laporan keuangan sudah disusun setiap tahun.

Laporan keuangan tahunan meliputi: Laporan akuntansi, Penjelasan Manfaat dan Kemalangan, Artikulasi Laba yang Dimiliki dan Pengumuman Penghasilan. Dalam laporan anggaran terdapat dua macam data penting yang harus diperoleh investor, khususnya bagian penggambaran sebagai kata pengantar dari otoritas, organisasi, yang menggambarkan konsekuensi dari pelaksanaan organisasi selama satu periode (satu tahun) yang lalu dan membahas

perkembangan-perkembangan baru yang terjadi dan akan mempengaruhi kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang.

Tujuan dari laporan keuangan untuk menyajikan suatu informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu organisasi atau perusahaan yang bermantaaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Entitas akuntansi yaitu unit tata usaha yang mengurus rencana pengeluaran, sumber daya, dan kewajiban yang menyelenggarakan pembukuan dalam memperkenalkan laporan keuangan berdasarkan pembukuan yang dimilikinya. Sedangkan unsur pengungkapan adalah suatu kesatuan administrasi yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu unsur pembukuan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memperkenalkan laporan pertanggungjawaban sebagai ikhtisar fiskal yang bermanfaat secara universal yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Masing – masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat
- d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. (Fathah, 2017)

### **2.1.5 Komponen – Komponen Laporan Keuangan**

Komponen – Komponen Laporan Keuangan Pokok yang harus disajikan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 ini terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan garis besar sumber, bagian, dan penggunaan aset keuangan yang telah diawasi oleh pemerintah pusat/provinsi, dan menggambarkan pemeriksaan antara rencana pengeluaran dan pengakuannya dalam satu periode pengumuman.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan-RA adalah penerimaan oleh Bendahara Keuangan Umum Negara/Pembiayaan Umum Daerah atau oleh zat pemerintah lainnya yang telah menambah lebih banyak Keseimbangan Pengeluaran pada waktu tahun moneter penting yang merupakan hak istimewa badan publik, dan tidak boleh diganti oleh badan publik .
2. Belanja adalah semua konsumsi oleh Bendahara Umum Negara/Pembiayaan Umum Provinsi yang mengurangi saldo pengeluaran yang berlebihan pada waktu tahun moneter penting yang tidak akan diganti oleh otoritas publik.
3. Transfer adalah penerimaan atau pembayaran uang tunai oleh elemen perincian dari/ke pelaporan lainnya, termasuk aset penyesuaian dan aset bagi hasil.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun – tahun

anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih menyajikan data tentang kenaikan atau pengurangan dalam Neraca Anggaran selama tahun perincian dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- d. Neraca

Neraca menggambarkan situasi keuangan elemen pengumuman sehubungan dengan sumber daya, kewajiban, dan nilai yang dimulai pada tanggal tertentu. Komponen yang dicakup oleh laporan akuntansi terdiri dari sumber daya, kewajiban, dan nilai.

Masing – masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset merupakan aset keuangan yang telah dikendalikan dan diklaim oleh otoritas publik karena kejadian sebelumnya dan dari mana keuntungan finansial dan sosial di masa depan diperlukan untuk diperoleh, baik oleh otoritas publik dan daerah setempat, dan dapat diperkirakan dalam satuan uang tunai, termasuk aset non-moneter diharapkan untuk pengaturan administrasi untuk populasi secara keseluruhan dan aset yang dipantau untuk alasan otentik dan sosial.

2. Kewajiban adalah kewajiban yang muncul dari peristiwa sebelumnya, penyelesaian yang membawa lonjakan aset keuangan pemerintah.
3. Ekuitas adalah total aset pemerintah yang merupakan kontras antara sumber daya dan kewajiban pemerintah

e. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional yang menyajikan garis besar aset keuangan yang memiliki nilai tambah dan pemanfaatannya diawasi oleh pemerintah pusat/provinsi untuk tindakan di dalam otoritas publik untuk satu periode rinci.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan – LO, beban, transfer, dan pos – pos luar biasa.

Masing – masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan – LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
  2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
  3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dan perimbangan dan dana bagi hasil.
- f. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak

diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

g. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan data uang mengenai pekerjaan, kontribusi, pemberian subsidi yang menggambarkan keseimbangan awal, penerimaan, konsumsi, dan keseimbangan akhir kas pemerintah pusat/lingkungan untuk periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

h. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

i. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sudah dimaksudkan sehingga laporan fiskal dapat dirasakan oleh klien dari data ringkasan anggaran secara luas, tidak terbatas pada pengguna tertentu. Dengan cara ini, ringkasan fiskal dapat berisi data yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di antara para pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pemakai dalam memahami laporan keuangan

(Menurut CaLK Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang).

Catatan atas Laporan Keuangan menggabungkan klarifikasi akun atau seluk-beluk angka yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan ikhtisar fiskal juga memasukkan data tentang pendekatan pembukuan yang digunakan oleh elemen pengumuman dan data lain yang diperlukan dan ditentukan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta artikulasi yang diharapkan dapat memberikan tampilan yang wajar dari laporan anggaran.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Mengungkapkan informasi Umum Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Menyajikan informasi kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi – transaksi dan kejadiankejadian penting lainnya;
- e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

- f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Terdapat perbedaan mendasar antara Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Standar Akuntansi Pemerintahan yang bergantung pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Perbedaan utama terletak pada penggunaan premis akun. Jika SAP pada tahun 2005 menggunakan premis uang yang diubah atau premis pengumpulan, penjelasannya adalah untuk mencatat sumber daya, kewajiban dan nilai menggunakan premis akumulasi, untuk mencatat pembayaran dan biaya menggunakan premis uang. (Pramono, 2014)

#### **2.1.6. Analisis Laporan Keuangan**

Dalam melakukan Analisis Laporan Keuangan, yaitu dengan menghitung Rasio Keuangan. Proporsi keuangan itu sendiri adalah suatu angka yang diperoleh dari hubungan suatu hal ringkasan fiskal dengan hal lain yang mempunyai hubungan penting dan besar.

Analisis Laporan Keuangan berarti : “menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui

kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.”

Analisis Laporan Keuangan pada umumnya meliputi :

- a. Rasio Efektifitas adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
- b. Rasio Keserasian adalah rasio yang mendeskripsikan aktivitas Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

*Bentuk dari analisis rasio keuangan adalah analisis aset, yang dapat diartikan :*

- a. Membandingkan nilai tiap – tiap pos aset dalam neraca tahun sekarang dengan tahun sebelumnya (dua periode pelaporan).
  - b. Menghitung proporsi dan persentase masing-masing kelompok aset dengan total aset
  - c. Menghitung modal kerja (*working capital*) yang dimiliki pemerintah daerah
  - d. Menghitung rasio keuangan terkait dengan aset
  - e. Mengevaluasi hasil penghitungan, interpretasi dan prediksi
- c. Analisis rasio :
- 1) Rasio Efektifitas
  - 2) Rasio Keserasian

Alasan masing-masing Rasio Keuangan adalah untuk menemukan korelasi nilai dan tingkat setiap sumber daya yang belum ditentukan, untuk melihat apakah sumber daya itu bernilai tinggi atau rendah dari nilainya yang wajar.

(Pilat & Morasa, 2017)

### **2.1.7. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah kerangka kerja yang berencana untuk membantu pengawas publik dalam mensurvei pencapaian suatu metodologi melalui perangkat estimasi moneter dan nonmoneter. Estimasi eksekusi area publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ulum, 2009:19-21).

Pengukuran kinerja adalah upaya evaluasi untuk kemajuan menetralsir tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu mengenai pencapaian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan tujuan, sasaran dan visi – misi suatu organisasi.

### **2.1.8. Alat Ukur Kinerja Keuangan**

Alat ukur kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan sehubungan dengan pencapaian suatu gerakan atau program dari suatu asosiasi atau organisasi untuk memahami tujuan, sasaran dan visi dan misi. aset moneter, yang mungkin dikendalikan di kemudian hari dan untuk mengantisipasi batas penciptaan aset yang ada (Barlian, 2003).

Kinerja keuangan dalam suatu organisasi sudah dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja keuangan dapat diperlukan untuk menilai suatu perubahan potensial.

### **2.1.9. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan**

Dalam pengukuran Kinerja Keuangan terdapat manfaat – manfaat, yaitu :

- a. Mengetahui pemahaman pelaksana dalam melaksanakan pengukuran digunakan untuk pencapaian kinerja suatu organisasi atau perusahaan.
- b. Tercapainya rencana kegiatan atau program yang disepakati oleh pelaksana
- c. Adanya evaluasi dalam pelaksanaan kinerja serta membandingkan dengan rencana kerja tersebut
- d. Sebagai alat komunikasi antara pimpinan dan bawahan dalam upaya memperbaiki kinerja suatu organisasi atau perusahaan

### **2.1.10. Penilaian Kinerja Keuangan**

Penilaian kinerja keuangan suatu organisasi adalah salah satu pendekatan untuk memenuhi komitmennya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh asosiasi atau organisasi. Dalam mensurvei pameran keuangan suatu asosiasi atau

organisasi dengan menggunakan tolok ukur seperti proporsi kelayakan, proporsi kesamaan,

Perbandingan dalam menganalisis rasio keuangan adalah dengan melihat proporsi moneter di tahun-tahun sebelumnya atau di tahun-tahun mendatang

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Danang Prio Utomo melakukan penelitian berjudul : Analisa Rasio Keuangan APBD Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 – 2009. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam mengelola keuangan daerah berdasarkan rasio keuangan daerah berdasarkan rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil penelitiannya dalam Undang – undang (UU) No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, didalam pengelolaan APBD harus mengacu pada norma dan prinsip : transparansi, akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektifitas anggaran. (Utomo, 2011)

Nurul Iqrayanti (2016-2018), dengan judul Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016 - 2018. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gowa diukur dengan pendekatan rasio keuangan daerah . Metode yang digunakan adalah Peneliti menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif, yakni menggunakan hitungan pada data keuangan yang didapatkan agar dapat memecahkan masalah sesuai dengan tujuan penelitian yang ada. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui

Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian Belanja Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Pertumbuhan. Hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD, menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gowa telah terjadi kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2018 ada penurunan anggaran. Di mana tahun 2016 anggaran PAD sebanyak Rp 168.865.893.977.00 atau 9,84% dari jumlah anggaran pendapatan. Kemudian di tahun 2017 PAD dinaikkan sebesar Rp 250.897.134.625.00 atau 14,14% dari jumlah anggaran pendapatan. Dan di tahun 2018 anggaran PAD mengalami penurunan sebesar Rp 208.160.896.819.00 atau 11,65% dari jumlah anggaran pendapatan.

Joko Pramono (2014), Hasil Analisis Pemkot Surakarta menyebutkan bahwa kinerja keuangan masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian, karena rasio kemandirian sebesar 15,83% (2010) dan 22,44 (2011) sedangkan rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011). Sehingga Pemerintah Kota Surakarta diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD.

Benny Rojeston Manaek Nainggolan (2018), dengan judul Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan. Tujuan penelitiannya untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan

hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Fuad 2016:137). Hasil Penelitiannya Pemerintah Kota Medan cukup efektif bahkan ditahun 2015 kemampuan keuangan masuk kategori sangat efektif yang artinya bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Medan tidak tergantung kepada bantuan pemerintah pusat/propinsi atau pinjaman karena pendapatan asli daerah Kota Medan sangat mencukupi untuk kebutuhan keuangan pada Pemerintah Kota Medan. Pola hubungan yang terjadi selama tahun 2013-2017 yaitu pola hubungan *delegatif* yaitu campur tangan.

Rigel Nurul Fathah (Universitas Aisyiyah Yogyakarta/2017), melakukan penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Tujuan peneliti yaitu untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik. Metode yang digunakan metode deskriptif kuantitatif yang melakukan perhitungan – perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil dari penelitian Secara geografis kabupaten Gunungkidul terletak antara 7°46'-8°09'Lintang Selatan dan 110°21'-110°50' Bujur Timur. Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Ibukotanya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km<sup>2</sup> atau 46,63% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pusat kabupaten

Gunungkidul terletak di Kecamatan Wonosari. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo di utara, Kabupaten Wonogiri di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Sleman di barat.

Putri Kemala Dewi Lubis, melakukan penelitian dengan judul Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013. Metode yang digunakan peneliti yaitu deskriptif dengan mengumpulkan data dan mengkaji fakta - fakta yang terkait. Hasil Penelitian Kabupaten Labuhan Batu adalah salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara, ibu kota Kabupaten ini terletak di Rantau Prapat. Labuhan Batu terkenal dengan hasil perkebunan sawit dan karet. Pada mulanya luas Kabupaten ini adalah 9.223,18km<sup>2</sup> sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 1.431.605 jiwa pada tahun 2007. Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara maka luas Kabupaten ini menjadi 2.562,01km<sup>2</sup> dan penduduknya sebanyak 857.692 jiwa pada tahun 2008. Kabupaten Labuhan Batu memiliki 9 kecamatan. (Ribeiro et al., 2013)

Nirmala Singgi (2018), melakukan penelitian dengan judul Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Palu. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Palu berdasarkan Rasio pertumbuhan tahun Anggaran 2008-2015. Metode yang digunakan penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data dan menggunakan data kuantitatif. Hasil penelitiannya pada tahun anggaran 2012 yaitu sebesar 19,36% sedangkan pertumbuhan pendapatan terendah yaitu pada

tahun anggaran 2010 sebesar 12,08%. Penerimaan pendapatan Pemerintah Kota Palu lebih dipengaruhi oleh pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat seperti dana perimbangan. Selanjutnya pertumbuhan pendapatan pada tahun 2015 menurun sebesar 13,04 karena menurunnya realisasi pos-pos penerimaan pendapatan dan Karena ada dana bagi hasil pajak yang ditarik dan dana transfer dari pemerintah pusat menurun. (Telecom & Dewi, 2017)

Juddy Julian Pilat, Jenny Morasa (2017), melakukan penelitian dengan judul Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado tahun Anggaran 2011-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007:68). Dari hasil perhitungan *Share* dan *Growth* terhadap LRA Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015, maka diperoleh data rata-rata *Share* sebesar 18,792% dan rata-rata *Growth* sebesar 120,503%. Kemudian dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran, posisi Kota Manado berada pada kuadran II, yaitu *share* rendah dan *growth* tinggi. Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih

rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi. Ini berarti Pemerintah Daerah Kota Manado masih dapat menggali potensi daerah lebih maksimal, sehingga dapat meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD. (Pilat & Morasa, 2017):

Yeni Dwi Ningtias, Tatas Ridho Nugroho, Nur Ainiyah (2012-2016), melakukan penelitian berjudul Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2016. Jenis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:13), metode dalam penelitian kuantitatif diartikan sebagai penelitian yang memacu pada prinsip *positivisme*, yang hasilnya dipakai dalam beberapa populasi, pengambilan data memakai instrument penelitian, analisis data yang berupa kuantitatif/statistik, yang bertujuan sebagai bahan uji hipotesis yang ditetapkan. Hasil dari penelitiannya yaitu rata-rata rasio kemandirian Kabupaten dan Kota di seluruh Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun sebesar 25,783%. Dengan jumlah tersebut, Tingkat kemandirian pemerintah daerah pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur periode 2012 sampai dengan 2016 dikatakan masih tergolong rendah, sehingga masuk kedalam kategori Konsultatif yaitu berkisar 25%-50% yang artinya nilai ketergantungan Pemerintah Kabupaten dalam membiayai kegiatan pemerintahannya masih sangat bergantung pada pihak ekstern atau Pemerintah pusat.(Ningtias et al., 2016)

Mentari Kurnia Dharmawati, Ririn Irmadariyani (2016), meneliti tentang judul Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif.

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data numerik atau angka dan analisisnya menggunakan cara matematis atau dengan tektik statistik (Sugiyono,2011:130). Metode analisis yang digunakan adalah metode stastistik deskriptif. Hasil Penelitiannya yaitu terjadi penurunan pada tahun 2012 sebesar 78,85% dan di tahun 2013 sebesar 78,52% hal ini terjadi Karena belanja operasi Kabupaten Banyuwangi kurang optimal. Hal ini disebabkan pada realisasi anggaran belanja operasi tidak banyak dialokasikan untuk belanja rutin. Pada tahun 2014 menurun hingga 75.67%.

### **2.3. Kerangka Berpikir**

Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tidak dapat dinilai dari realisasi penyerapan dana, ketaatan waktu penyampaian dari angka – angka yang tertera dalam laporan keuangan saja, karena laporan keuangan pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah yang diperoleh sudah digunakan sesuai anggaran atau perundang – undangan yang berlaku. Dengan demikian laporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, bagaimana penggunaannya, realisasi penyerapan dana dan pendapatan Dinas Perhubungan.

Untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dilakukan analisis kinerja dengan menggunakan dasar analisis yaitu laporan keuangan yang berbasis SAP dan teknik analisisnya memakai perhitungan

rasio – rasio atas laporan keuangan yang terdapat di Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yaitu, Rasio Efektivitas dan Rasio Keserasian. Untuk Rasio Kemandirian daerah, Rasio efisiensi, Rasio pertumbuhan dan Rasio DSCR itu tidak ada pada Dinas Perhubungan (OPD). Perhitungan rasio dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Dinas Perhubungan, maka penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analisis rasio keuangan dan pendekatan kuantitatif.

Secara sistematis model penelitian yang dipakai berdasarkan kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.3 Model Penelitian

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian kuantitatif dikembangkan dari telaah teoritis sebagai jawaban sementara dari masalah atau pertanyaan yang memerlukan pengujian secara empiris. Hipotesis alternatif yang dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu :

1.  $H_1$  = ada perbedaan antara kinerja keuangan Dinas Perhubungan dalam bentuk Rasio Efektivitas
2.  $H_2$  = ada perbedaan antara kinerja keuangan Dinas Perhubungan dalam bentuk Rasio Keserasian

